



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

GEDUNG PRIJADI PRAPTO SUHARDJO I LANTAI II JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2, JAKARTA, 10710  
TELEPON (021) 3449230 (20 Saluran) FAKSIMILE (021) 3454640 website: www.djpb.depkeu.go.id

Nomor : S- **63** /PB/2017  
Sifat : Segera  
Hal : Pencairan Dana Uang Persediaan (UP) Tahun 2017

4 Januari 2017

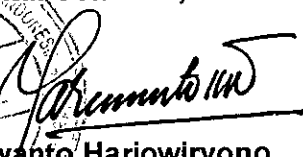
Yth.

1. Para Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan pembayaran Uang Persediaan (UP) pada awal tahun anggaran 2017, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka mendukung pembiayaan operasional satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga untuk melakukan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsinya, pencairan Uang Persediaan pada awal tahun 2017 diatur sebagai berikut :
  - a. Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga dapat melakukan pencairan dana Uang Persediaan sepanjang telah melakukan proses rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2016 dengan KPPN, meskipun rekonsiliasi belum selesai.
  - b. Pencairan dana Uang Persediaan tersebut diberikan dengan persyaratan :
    - 1) Satuan Kerja Kementerian Negara/Lembaga telah mempertanggungjawabkan UP/TUP tahun 2016;
    - 2) Permintaan pencairan dana Uang Persediaan Satker dilampiri dengan surat pernyataan bahwa KPA akan segera menyelesaikan rekonsiliasi Laporan Keuangan Tahun 2016.
2. Kanwil Ditjen Perbendaharaan tidak diperkenankan memberikan persetujuan UP melampaui besaran UP, selama Satuan Kerja belum menyelesaikan rekonsiliasi laporan keuangan.
3. Pelaksanaan pembayaran Uang Persediaan (UP) tahun anggaran 2017 agar tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Demikian disampaikan, agar dipedomani.

Direktur Jenderal,  
  
Marwanto Harjowiryo  
NIP. 195906061983121001

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
2. Para Direktur lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan